

LAPORAN PENELITIAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN
KENEGARIAN SULIT AIR KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT**



MILIK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG

DITERIMA TGL. : _____
SUMBER / HARGA : H / _____
KOLEKSI : K
NO. INVENTARIS : 648/K/97 - P₂⁽²⁾
KLASIFIKASI : 320.9590/4 ASR 702

Oleh :

DRS. ZUL 'ASRI
(Ketua Tim Peneliti)

Penelitian ini dibiayai oleh :
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1995/1996
Surat Perjanjian Kerja No. : 36/PT.37.H8/N.1.4.2/1995
Tanggal 7 Agustus 1995

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1996

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

LAPORAN PENELITIAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PEMBANGUNAN
KENEGARIAN SULIT AIR KABUPATEN SOLOK
SUMATERA BARAT**

OLEH

Konsultan Penelitian: DR. AGUS IRIANTO

Ketua Tim Peneliti : DRS. ZUL 'ASRI

Anggota Peneliti : DRA. SUSI EVANITA, M.S

DRS. ETMIHARDI

A B S T R A K

Zul'Asri, dkk. Partisipasi Masyarakat Pada Program Pembangunan Kenegarian Sulit Air Kabupaten Solok Sumatera Barat

Dewasa ini pembangunan masyarakat desa mendapat perhatian khusus pihak pemerintah, terutama dari segi pengelolaannya. Dalam strategi pelaksanaannya, masyarakat desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai perencana, pelaksana, dan penganyam hasil pembangunan. Pendekatan ini menuntut peran serta (partisipasi) aktif masyarakat desa itu sendiri dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dengan kata lain partisipasi masyarakat adalah merupakan kunci sukses pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Karena itu studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu gejala yang layak untuk dikaji guna mensukseskan berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Selanjutnya bila uraian di atas dikaitkan dengan pembangunan masyarakat desa Sulit Air, Kabupaten Solok, partisipasi aktif masyarakat diduga telah turut menentukan keberhasilan yang telah dicapainya. Kenegarian Sulit Air yang dulu merupakan negari minus, terisolir dan tertinggal perekonomiannya, berhasil keluar dari permasalahannya. Keadaan ini merupakan gejala yang cukup menarik untuk diteliti, sementara kita mendengar

dari banyak pihak tentang sinyalemen semakin menurunnya partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan.

Untuk kasus ini, rumusan masalah yang mendapat perhatian utama adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sulit Air terhadap program pembangunan, khususnya pada bidang pendidikan formal, fisik desa, kesehatan, dan ekonomi serta apa yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat Kenegarian Sulit Air pada beberapa bidang program pembangunan tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat Sulit Air pada program pembangunan bidang pendidikan formal, fisik desa, kesehatan, dan ekonomi, serta mengetahui latar belakang partisipasinya dalam beberapa bidang program pembangunan tersebut. Selanjutnya berdasarkan tujuan di atas digunakan konsep Weber secara terbatas, yang berarti antara partisipasi dan mobilisasi diberi batasan. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat secara sukarela, sedang mobilisasi diartikan hanya melihat keterlibatan tokoh atau pemuka masyarakat dalam menyampaikan dan menggerakkan gagasan.

Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pembangunan pedesaan pada umumnya, terutama untuk memecahkan berbagai kendala dalam usaha mengembangkan partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan.

Penelitian ini dilakukan di Kenegarian Sulit Air,

Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu: Duo Koto, Gando, Silungkang, Tigo Korong, Linawan, Rawang, Talago Laweh, Bali, dan Siaru Kunyit Balai.

Bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data yang dimanfaatkan adalah informan, tempat dan peristiwa, serta arsip dan dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, serta mencatat dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis antar kasus desa dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Sulit Air adalah perantau. Satu hal yang sangat positif dimiliki masyarakat rantau Sulit Air ini adalah tertanamnya rasa tanggung jawab untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga di kampung, yang memang banyak tergantung dari rantau, sehingga muncullah julukan bagi kenegarian ini sebagai "nagari wesel". Sikap ini akhirnya menumbuhkan pula rasa cinta kampung halaman. Berarti masyarakat rantau yang berhasil tidak lagi hanya memikirkan sanak keluarganya, tetapi juga kampung halamannya. Selanjutnya untuk memudahkan mengorganisir pembangunan kampung ini masyarakat Sulit Air membentuk wadah organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) yang dikukuhkan pada tanggal 3 Juli 1970. Dalam perjalannya SAS telah mampu menjadi mobilisator dan mediator dalam pembangunan Sulit Air. Hal ini terbukti dalam setiap

usaha pembangunan yang telah dilaksanakan, baik pada bidang pembangunan fisik desa, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terlihat partisipasi aktif masyarakat rantau (DPP SAS), atau bantuan pribadi perantau, di samping pemerintah. Sedangkan partisipasi masyarakat Sulit Air penghuni kampung terutama pada sumbangan tenaga dan kesediaan sebagian masyarakat dalam menyumbangkan tanahnya bagi pembangunan.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKIP Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Lembaga Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana IKIP Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Saya menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan laporan penelitian Lembaga Penelitian IKIP Padang, yang dilakukan secara "blind reviewing". Kemudian diseminarkan yang melibatkan dosen senior dan tim Kredit Point IKIP Padang untuk

tujuan diseminasi. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian, Dosen Senior dan anggota tim Kredit Point IKIP Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Secara khusus kami menyampaikan terimakasih kepada Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.



Padang, Maret 1996

Ketua Lembaga Penelitian
IKIP Padang

Kumaidi
Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D
NIP 130 605 231

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pertanyaan Penelitian	6
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	7
A. Pembangunan Masyarakat Desa	7
B. Partisipasi	11
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	15
A. Subyek Penelitian	15
B. Setting Penelitian	15
C. Bentuk Dan Strategi Penelitian ...	16
D. Sumber Data	16
E. Triangulasi	17
F. Teknik Pengumpulan Data	18
G. Teknik Analisis Data	18
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Hasil Penelitian	19
1. Deskripsi Lokasi	19
2. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Fisik	27

3. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Pendidikan	35
4. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi	41
5. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Kesehatan	55
6. Latar Belakang Partisipasi Ma- syarakat Pada Pembangunan Sulit Air	58
B. Pembahasan	65
BAB V. KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang terfokus pada masyarakat desa, telah merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang tepat, terutama dalam memecahkan masalah sosial ekonomi di negara kita dalam beberapa dasawarsa ini. Untuk itu, pemerintah telah dan sedang mengembangkan strategi yang diharapkan cukup ampuh dalam pelaksanaan pembangunan untuk memerangi kemiskinan di kalangan masyarakat desa. Oleh karena masyarakat desa dengan ciri-cirinya yang dalam beberapa hal masih lemah dalam berbagai aspek pembangunan, mereka membutuhkan uluran tangan berbagai pihak dalam pengelolaannya.

Masyarakat desa dengan kualitas secara fisik dan mental masih rendah, cara berfikir dan bertindak masih sederhana, masalah lingkungan dan kondisi sosial budaya, hidup terpencil, adat istiadat yang mengikat, adalah kendala-kendala yang merupakan ciri yang sering diketemukan dalam proses pembangunan desa, dan menjadi titik persoalan yang dihadapi instansi terkait dan organisasi lainnya dalam pengelolaannya. Oleh karena itu langkah-langkah dalam merencanakan program pembangunan desa haruslah memperhatikan keadaan masyarakat, karakteristik dan kebiasaan hidup yang dianut masyarakat, karena akan besar pengaruhnya pada

keberhasilan program tersebut. Selain itu pembangunan desa membutuhkan usaha semua pihak, baik pemerintah dan non pemerintah, serta menuntut adanya keterpaduan serta koordinasi antar lembaga yang mendukung.

Salah satu strategi yang telah dan akan dikembangkan dalam pembangunan masyarakat desa adalah keterpaduan instansi terkait dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Dengan demikian berarti strategi pembangunan desa adalah mengupayakan peningkatan sumber daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, sehingga dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan cara menumbuhkan peran serta (partisipasi) aktif masyarakat dalam program pembangunan, sehingga masyarakat desa tidak saja sebagai obyek pembangunan, juga dalam arti sebagai perencana, pelaksana, dan penguji hasil pembangunan (Maskun, 1994:22-23).

Berdasarkan jalan pikiran di atas, berarti pembangunan di segala bidang akan berhasil baik, apabila seluruh anggota masyarakat turut berperan aktif dalam memajukan program pembangunan dan bukan hanya menjadi subyek yang pasif. Artinya pembangunan desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia serta meningkatkan keterampilan dan prakarsa, dengan mendapat bimbingan dan bantuan pemerintah. Atas dasar tersebut, prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan

pembangunan desa adalah meletakkan tujuan pembangunan pada masyarakat desa yang bersangkutan.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat selalu merupakan pusat perhatian dari berbagai kalangan, terutama pihak yang mengkaji masalah pembangunan dalam meluncurkan proyek pembangunan yang ditujukan pada suatu daerah tertentu. Untuk itu studi tentang partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan merupakan suatu gejala yang layak untuk diteliti, karena belum semua masyarakat desa memiliki partisipasi sebagaimana yang diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan, baik menyumbang berupa benda, pikiran, dan tenaga dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Dalam kaitannya dengan hasil-hasil pembangunan pedesaan di kenegarian Sulit Air, Kabupaten Solok, partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, karena hal itu bagaimanapun menjadi salah satu faktor penentu dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Meskipun demikian faktor-faktor lain tidak bisa diabaikan begitu saja. Kenegarian Sulit Air yang bila dilihat dari segi potensi sumber alamnya merupakan salah satu daerah minus, terpencil dari sentra ekonomi dan masih tertinggal perekonomiannya di Sumatera Barat. Namun dalam dua dasawarsa terakhir ini

menampakkan keberhasilannya. Keadaan ini merupakan suatu gejala yang cukup menarik untuk diteliti, karena merupakan suatu hal yang menonjol dari yang lain, sementara kita mendengar dari banyak pihak tentang sinyalemen semakin menurunnya partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan desa.

Bertitik tolak dari hal di atas, muncul pertanyaan yang penulis anggap perlu mendapatkan penjelasan. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Sulit Air terhadap program pembangunan pada bidang pendidikan, fisik desa, ekonomi dan kesehatan khususnya, dan bagaimana partisipasi semacam itu dapat berkembang pada masyarakat Kenegarian Sulit Air. Apakah partisipasi tersebut didorong oleh adanya tuntutan dan tekanan dari pemerintah atau organisasi lainnya atau ada faktor lain yang lebih kuat untuk dijadikan dasar bagi tumbuhnya kesadaran atau dorongan untuk berpartisipasi tersebut. Dalam hal ini karena keterbatasan waktu dan dana serta kemudahan dalam mendapatkan data, peneliti membatasi masyarakat Sulit Air yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Sulit Air yang menetap di kampung dan terlibat dalam organisasi-organisasi yang sangat berperan dalam pembangunan.

B. Perumusan Masalah

Dengan berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka studi ini mengarahkan kajiannya pada beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Kenegarian Sulit Air pada program pembangunan desa ?
2. Apa yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat Kenegarian Sulit Air pada program pembangunan desa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Sulit Air pada program pembangunan desa bidang pendidikan formal.
2. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Sulit Air pada program pembangunan fisik desa.
3. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Sulit Air pada program pembangunan bidang kesehatan.
4. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Sulit Air pada program pembangunan desa bidang ekonomi.
5. Mengetahui latar belakang partisipasi masyarakat kenagarian Sulit Air pada program pembangunan bidang pendidikan formal, kesehatan, fisik desa, dan ekonomi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pembangunan pedesaan pada umumnya, terutama untuk memecahkan berbagai kendala dalam usaha mengembangkan partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan.

E. Pertanyaan Penelitian

Dengan berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka studi ini mengarahkan kajiannya pada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Silit Air pada program pembangunan fisik desa ?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat kenagarian Silit Air pada program pembangunan desa bidang pendidikan formal ?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat kenegarian Silit Air pada program pembangunan desa di bidang ekonomi ?
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat kenegarian Silit Air pada program pembangunan desa bidang kesehatan ?
5. Apa yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat Silit Air pada bidang pembangunan fisik desa, pendidikan formal, ekonomi, dan kesehatan tersebut ?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pembangunan Masyarakat Desa

Sebelum kita sampai pada pengertian pembangunan masyarakat desa, ada baiknya kita kemukakan pengertian yang terpisah antara pembangunan dan masyarakat desa. Berbicara mengenai masalah pembangunan, begitu banyak pengertian yang diberikan para ahli dalam pengertian yang berbeda sesuai dengan pandangannya. Namun dari beberapa pengertian yang berbeda tersebut sebetulnya kita menemukan satu unsur yang sama, yaitu unsur perubahan ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini dapat kita lihat dari beberapa pernyataan berikut.

Riyadi (1981:7-8) menyatakan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses terjadinya perubahan-perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat yang sedang melakukan pembangunan itu. Dengan demikian pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses perubahan dan pertumbuhan dari banyak peristiwa yang dilakukan melalui upaya khusus untuk mencapai sasaran perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan (Mubyarto,1980).

Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang, juga tidak luput dengan kata pembangunan dan segala persoalannya ini. Mengingat sebagian besar

penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan (Mub-yarto, 1980), maka kita juga harus memfokuskan pembangunan ke arah pedesaan di samping pembangunan perkotaan. Di samping itu kita juga harus mengingat bahwa salah satu ukuran keberhasilan program pembangunan suatu bangsa adalah terletak pada keberhasilan negara tersebut dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga muncullah istilah pembangunan masyarakat desa.

Munculnya istilah masyarakat desa, sebetulnya hanyalah karena faktor geografisnya saja, sehingga masyarakat secara geografis dapat dibedakan ke dalam masyarakat desa dan masyarakat kota. Oleh sebab itu kita dapat saja mengatakan bahwa masyarakat desa adalah sekelompok manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terikat dengan adanya rasa kebersamaan dan identitas bersama pada daerah pedesaan (Koentjaraningrat, 1977:71).

Dari dua pengertian di atas, pembangunan desa berarti proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang merupakan sub sistem pembangunan masyarakat, regional dan daerah yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat (Maskun, 1984:7). Sejalan dengan itu pengertian pembangunan desa Daerah Tingkat I Sumatera Barat, adalah segala usaha dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada unit pemerintahan terendah, baik yang berupa fisik maupun mental spritual dalam rangka meningkatkan taraf hidup

dan kesejahteraan masyarakat desa.

Bertitik tolak dari pandangan di atas, maka pembangunan masyarakat desa telah merupakan titik sentral program pembangunan di negara kita dewasa ini. Dengan harapan keberhasilan program pembangunan masyarakat desa dapat memecahkan berbagai persoalan sosial ekonomi dan politik di dalam negara kita. Dengan latar belakang tersebut pemerintah selalu mencari strategi dan pendekatan program pembangunan masyarakat desa yang memiliki keunikan masing-masing.

Dalam beberapa dekade, kita melihat beberapa pendekatan yang telah digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, mulai dari top-down yang ternyata memberikan pengalaman yang menjadikan pasif dan semakin tergantungnya masyarakat desa dalam pembangunan daerahnya. Strategi bottom-up ternyata tidak bisa dijalankan secara penuh, mengingat masyarakat desa masih memiliki banyak keterbatasan, terutama dari segi biaya. Sehingga kedua strategi ini tidak mungkin dilaksanakan secara utuh untuk masing-masingnya. Karena itu strategi mengintegrasikan keduanya dirasakan cocok untuk diterapkan dalam arti mengembangkan program-program pembangunan desa melalui top-down dan bottom-up sekaligus secara terpadu (Maskun, 1994: 30-31).

Pendekatan di atas menuntut adanya saling pengertian antara masyarakat dengan pemerintah dalam bentuk usaha yang berasal dari masyarakat, atas dasar

ide masyarakat dan kebijaksanaan serta strategi pemerintah secara serasi. Dalam arti kata masyarakat mengantisipasi politik pembangunan pemerintah, dan kemudian berpartisipasi dengan memperhitungkan potensi dan permasalahan yang dihadapi wilayah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang dinyatakan Maskun (1991:1) yang menyatakan bahwa pembangunan masyarakat desa dilakukan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Karena pembangunan desa meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, berarti program pembangunan yang ditujukan pada masyarakat desa adalah menyeluruh dan mencakup semua aspek, antara lain pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan bidang lainnya yang menyangkut dengan peningkatan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Namun dalam penelitian ini, peneliti membatasi pembangunan pada beberapa bidang saja, yaitu: pendidikan formal, kesehatan, fisik desa, dan ekonomi.

Dengan adanya pandangan bahwa pada dasarnya pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan terbatas pada membantu masyarakat untuk dapat membangun dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri (to help people to help them self), berarti partisipasi masyarakat adalah merupakan kunci daya gerak masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat adalah

merupakan kunci sukses pelaksanaan pemabangunan tersebut. Untuk itu, studi tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan suatu gejala yang layak untuk dikaji, karena belum semua masyarakat memiliki partisipasi sebagaimana yang diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

2. Partisipasi

Pada uraian di atas, kita melihat keterkaitan partisipasi dengan pembangunan. Dalam arti kata bahwa partisipasi memberikan sumbangan dan turut menentukan arah serta tujuan pembangunan (Koentjaraningrat, 1981:80). Pada dasarnya partisipasi berasal dari bahasa Inggris "Participation", yang diartikan sebagai ikut sertanya seseorang mengambil bagian dalam suatu kelompok, organisasi atau dalam suatu aktivitas bersama.

Berikut ini, beberapa ahli menganggap hampir tidak mungkin untuk membuat batasan mengenai partisipasi yang bersifat universal. Soekanto (1985:355) memberikan definisi terhadap partisipasi adalah sebagai peserta dalam suatu kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu. Sedangkan Webster mendefinisikan partisipasi sebagai suatu tindakan ambil bagian dari seseorang dalam suatu kegiatan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya Saleh (1995) mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan seseorang secara suka-

rela, karena pertimbangan rasional, rasa keterpanggilan, rasa memiliki, dan rasa tanggung jawab.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1987:79) dan Hanafiah (1978) membagi partisipasi atas dua tipe. Tipe pertama bersifat fisik dan menuntut kerjasama, sedang tipe kedua bersifat non-fisik dan dilakukan secara individual. Dengan demikian partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertanya seseorang dalam suatu kesatuan atau kelompok orang dalam suatu aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non-fisik secara sukarela.

Dari pengertian di atas, kita melihat pengertian partisipasi hanya diartikan sebagai ikut sertanya seseorang dalam kegiatan tertentu. Kalau kita hanya berpijak pada pengertian tersebut maka kita akan rancu dalam menilai intensif atau tidaknya partisipasi yang diberikan seseorang. Untuk itu Koentjaraningrat (1981:79-80) menyatakan bahwa partisipasi yang intensif bukan hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya frekuensi keikutsertaan seseorang dalam aktivitas bersama, tetapi juga harus dinilai mutu kerjanya serta relevansinya dalam kebijaksanaan yang menjadi pedoman pembangunan. Selanjutnya dalam menelusuri keikutsertaan seseorang, kita diingatkan oleh Hotman dalam Ritzer (1985), yang mengemukakan proposisi tentang suatu tindakan keikutsertaan, yaitu (1) karena mengharapkan imbalan, atau (2) menghindari hukuman.

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat (1981:79) menyatakan bahwa kalau masyarakat ikut serta berdasarkan atas keyakinan bahwa proyek akan bermanfaat baginya, maka partisipasi diberikan dengan penuh semangat dan spontanitas tanpa mengharapkan upah yang besar, sebaliknya jika mereka tidak melihat adanya manfaat pembangunan tersebut, maka partisipasi yang diberikanpun rendah dan tidak sungguh-sungguh. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mengandung pengertian aktif, bukan asal mengambil bagian secara ikut-ikutan atau terpaksa (Soekanto, 1985:426). Adanya partisipasi seperti itu, diperkirakan akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan.

Usaha penyadaran masyarakat atau menggerakkan masyarakat akan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan disebut dengan mobilisasi (Saleh, 1989:3). Sementara itu Weber melihat bahwa antara partisipasi dan mobilisasi adalah kontinum yang masing-masing terletak di kutub yang berbeda (Saleh, 1989:8-90). Lebih jauh Weber menguraikan partisipasi dan mobilisasi dalam konsepnya tentang tipe ideal bahwa secara tipe ideal karakteristik utama partisipasi adalah sukarela, tanpa disuruh atau tanpa digerakkan dan tanpa tekanan. Karena partisipasi adalah atas kemauan sendiri, maka tidak memerlukan pengawas. Sedang karakteristik utama mobilisasi adalah wajib, digerakkan, dan adanya sanksi.

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian ini, akan digunakan konsep Weber secara terbatas. Artinya antara partisipasi dan mobilisasi diberi batasan. Untuk partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat secara sukarela. Sedang mobilisasi hanya melihat keterlibatan tokoh atau pemuka masyarakat yang hidup bersama masyarakat dalam menyampaikan dan menggerakkan gagasan dari bawah (masyarakat). Selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan, anggota masyarakat juga terlibat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan itu. Untuk pemahaman lebih lanjut tentang partisipasi, perlu pula kita melihat konsep lainnya yang berkaitan erat dengan konsep partisipasi, yaitu konsep solidaritas sosial (Saleh, 1989:6). Partisipasi mempunyai korelasi positif dengan solidaritas sosial. Semakin kuat solidaritas sosial, maka semakin kuat partisipasi. Lebih jauh Saleh mengemukakan bahwa solidaritas tumbuh dari adanya keterikatan dengan kelompoknya (masyarakatnya). Rasa keterikatan tersebut tumbuh bila kepentingan yang bersangkutan terlindungi dalam kepentingan bersama yang kemudian menjadi bagian atau menyatu dengan kepentingan bersama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kenagarian Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang terdiri dari 9 (sembilan) desa, yaitu: Duo koto, Gando, Silungkang, Tigo Korong, Linawan, Rawang, Talago Laweh, Basuang Limaupuruik (Bali), dan Siaru Kunyiik Balai (SKB). Daerah ini dijadikan sebagai subyek penelitian dengan pertimbangan keunikan daerah ini dibanding daerah lain di Kabupaten Solok khususnya dan Sumatera Barat umumnya dalam keberhasilan pembangunan yang dicapainya. Daerah ini secara ekonomis geografis merupakan daerah minus dan jauh dari ibukota kabupaten sebagai pusat perekonomian, sedang kalau kita perhatikan sekarang telah jauh berkembang dibanding daerah-daerah lain terutama di Kabupaten Solok (Observasi Pendahuluan).

B. Setting Penelitian

Setelah mengadakan mengadakan studi pendahuluan, peneliti berkesimpulan bahwa masyarakat Kenegarian Sulit Air, Kabupaten Solok, memiliki sifat terbuka dan dinamis. Sehingga memungkinkan peneliti untuk mengadakan observasi langsung pada daerah penelitian. Keadaan ini mendorong peneliti untuk menelusuri lebih lanjut pertanyaan penelitian secara mendalam.

C. Bentuk dan Strategi Penelitian

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan partisipasi, maka bentuk penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan bentuk ini akan mampu mengungkapkan berbagai informasi kualitatif. Karena lokasi penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) desa dengan karakteristiknya sebagai unit analisis, maka untuk merumuskan kesimpulan studi dilakukan dengan analisis antar desa.

D. Sumber Data

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah informan (tokoh masyarakat formal dan informal), tempat dan peristiwa, serta arsip dan dokumen.

1. Informan

Informan dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa beserta perangkatnya, pengurus koperasi, pengurus Lumbung Pitih Nagari (sekarang lebih dikenal dengan BPR gaya baru), pegawai BPR, Pengurus Perwakilan Sulit Air Sepakat (SAS), Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) beserta perangkatnya, pemuda, pengurus yayasan sosial dan pendidikan, tokoh informal lainnya dalam masyarakat.

648/K/97 (2)

KI
330.95984
ASR

17

17

2. Tempat dan Peristiwa

Ini meliputi lokasi dan produk-produk fisik serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat.

3. Arsip dan Dokumen

Seluruh arsip dan dokumen yang didapatkan menyangkut daerah ini.

E. Trianggulasi

Data yang didapatkan dari sumber-sumber di atas, dicek kebenarannya dengan tempat dan peristiwa yang terjadi selama periode penelitian ini, dokumen, arsip, dengan mempertimbangkan pengamatan langsung peneliti dan nara sumber lainnya dalam ruang lingkup daerah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini kualitatif beserta jenis dan sumber data yang digunakan, maka data dari variabel penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, serta mencatat dokumen.

1. Wawancara

Wawancara menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka dengan orientasi yang mengacu kepada suatu fokus untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Informan digiring ke suatu fakta untuk mengorek informasi yang menyangkut sikap, perasaan, pendapat, dan pandangannya.

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

2. Observasi

Observasi dilakukan pada kegiatan-kegiatan sehari-hari masyarakat, pekerjaan yang bersifat fisik dan non fisik.

3. Mencatat Dokumen

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan data dari arsip dan laporan-laporan kegiatan masyarakat, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak.

G. Teknik Analisis Data

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa. Tapi karena kasus dalam penelitian ini terdiri dari 9 (sembilan) desa, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis antar kasus desa dengan model analisis interaktif.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Lokasi.

Kenagarian Sulit Air terdiri dari 9 (sebilan) desa yang berada di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, terletak pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi sebagian besar adalah perbukitan gundul yang minus dan tandus, yang banyak ditumbuhi oleh padang alang-alang dan semak belukar, sedang di lembahnya yang cukup dalam membentang sebuah sungai yang berhulu di sebelah selatan yaitu Batang Katialo. Pada pinggang perbukitan ini membentang jalan yang menghubungkan masing-masing desa dan dengan daerah luar. Pada kiri-kanan jalan itu umumnya terdapat perumahan penduduk yang adakalanya pada lokasi-lokasi tertentu sangat berdesakan. Jalan tersebut menghubungkan Sulit Air dengan kota Solok sebagai ibukota kabupaten, sepanjang lebih kurang 30 kilometer. Setengah dari panjang jalan itu, selepas Danau Singkarak dari Solok akan dilewati pendakian dengan jurangnya yang dalam, tidak dijumpai perkampungan, dan sebagian besar hutan belantara.

Akhir-akhir ini setelah adanya usaha untuk menggalakkan penghijauan, perbukitan-perbukitan gundul

tersebut ditanami dengan pohon pinus dan kemudian muncul gagasan baru untuk menanam dengan tanaman yang produktif, seperti kemiri, jengkol, kopi, casiavera, dan sebagian kecil tanaman rambutan dan cengkeh. Pada bagian yang datar dan lembah serta bagian-bagian tertentu terdapat persawahan dengan tanaman padi dan plawija, dan tanaman tua kelapa. Sementara itu, areal persawahan tersebut bersifat tadah hujan, yang menurut Dt. Polong Kayo (wawancara, Silungkang, 21 Oktober 1995) produksinya paling tinggi hanya mampu memberi makan sepertiga penduduk Nagari Silit Air setiap panen.

Secara umum dari segi ekonomi, kenagarian Silit Air dapat dibagi dalam 2 (dua) wilayah. Pertama, mata pencaharian penduduk yang dominan pertanian, sesuai dengan lahannya yang cukup luas untuk itu, diwakili oleh desa: Rawang, Linawan, Basuang Limaupuruik (Bali), Siaru Kunyik Balai (SKB), Talago Laweh, dan Tigo Korong. Kedua, mata pencaharian yang dominan non pertanian diwakili oleh desa: Duo Koto, Gando dan Silungkang. Wilayah ini mempunyai lahan yang sempit, baik untuk pertanian maupun untuk pemukiman. Pada lokasi inilah penduduk kenagarian Silit Air lebih terkonsentrasi, sehingga penduduknya sangat padat dengan pemukiman yang berdesakan, yang hampir tidak mempunyai tata ruang yang sehat.

Perbedaan dua tipe wilayah tersebut berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Sulit Air. Bagi mereka dengan lahan pertanian yang luas lebih banyak tergantung dari hasil pertanian. Sementara mereka yang berlahan sempit membuka usaha kerajinan, usaha kecil, kebutuhan sehari-hari, dan ada pula yang hanya menunggu kiriman uang (wesel) dari perantau (sanak familinya yang mencari penghidupan di rantau). Menurut Dt. Polong Kayo (wawancara, Silungkang, 21 Oktober 1995) sekitar 75% penduduk Sulit Air pergi merantau dan yang terbesar berasal dari desa Duo Koto, Gando dan Silungkang, hal ini disebabkan oleh lahannya minus dan sempit. Kemudian setelah menjadi orang yang berhasil, mereka mengirimkan uang untuk membantu keluarganya yang berada di kampung dan membantu pembangunan kampung halamannya sendiri. Walaupun secara umum masyarakat Sulit Air terkenal sebagai perantau dan pedagang, namun kalau dilihat secara khusus adalah berada dalam 2 (dua) tipe tersebut.

Pada wilayah yang berlahan sempit tersebut banyak terdapat pedagang dan pengusaha yang berhasil di rantau. Mereka ini karena umumnya selalu mengirimkan uang untuk keluarganya yang berada di kampung, maka pada akhirnya menyebabkannya banyak tergantung dari kiriman wesel dari rantau itu. Sehingga daerah ini terkenal dengan istilah "nagari wesel", karena sebagian besar penduduknya hidup dari kiriman uang

dari sanak familinya yang mencari penghidupan di rantau (kota). Model yang seperti ini lambat laun mewabah ke wilayah yang lain. Namun pada saat ini di wilayah ini sudah mulai dikembangkan usaha kerajinan rumah tangga yang dirintis oleh perantau, di samping usaha perdagangan kecil untuk kebutuhan sehari-hari.

Dari segi pertanian, kalau dilihat secara menyeluruh di kenagarian Sulit Air terdapat beraneka jenis tanaman produksi, namun hal tersebut tidak banyak dapat untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan penghasilan masyarakat. Oleh karena itu, merantau adalah suatu alternatif jalan keluar untuk "merobah nasib" (peningkatan kualitas hidup dan penghasilan) bagi masyarakat Sulit Air.

Sebelum keluar Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang perubahan pemerintahan, dari Nagari menjadi Desa, Sulit Air merupakan satu kesatuan administratif pemerintahan kenagarian yang membawahi 14 jorong. Namun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah tersebut, kenagarian ini sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terbagi menjadi 9 desa dengan administrasi pemerintahan masing-masing. Berarti secara administratif pemerintahan nagari menjadi hilang dan jorong-jorong yang ada, yang sebelumnya merupakan substitusi bagi nagari, secara administratif beralih menjadi pemerintahan desa (ada beberapa jorong digabung menjadi satu desa).

Pada beberapa kenagarian di Sumatera Barat ini, hal yang seperti di atas menjadi permasalahan terhadap kesatuan hukum adat dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apalagi terhadap kesatuan desa yang bersangkutan, tetapi pada Kenagarian Sulit Air hal itu tidak terjadi, karena ada ikatan tradisional adat istiadat dan organisasi masyarakat Sulit Air yang cukup kuat, yang lebih dikenal dengan Sulit Air Sepakat (SAS). Yang terakhir ini sangat penting sekali artinya sebagai mediator bagi masyarakat Sulit Air.

Kerapatan Adat Nagari sangat besar sekali fungsinya di Sulit Air. Permasalahan yang menyangkut adat istiadat dan hal-hal yang di luar jangkauan administrasi desa biasanya Kerapatan Adat Nagari yang menyelesaikannya. Seperti dikemukakan oleh Dt. Bagindo Rajo (wawancara, Gando, 21 Oktober 1995) mengenai persoalan perkawinan sepasang warga Sulit Air yang cukup disegani oleh masyarakatnya yang berada di dalam satu suku yang sama (endogami) dan masih ada hubungan famili yang tidak dibolehkan oleh adat istiadat (tabu). Namun keduanya berketeguhan hati untuk melangsungkan perkawin, tetapi tidak sanggup melanggar adat istiadat begitu saja. Untuk menyelesaikan persoalan ini diadakanlah rapat luar biasa Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan memutuskan sekiranya keduanya akan melangsungkan perkawinan juga, tidak boleh di Nagari Sulit Air.

Selanjutnya setelah melihat tuntutan zaman dan perkembangan masyarakatnya, maka Kerapatan Adat juga memutuskan dengan membolehkan untuk memekarkan suku-suku (marga) yang ada. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan jumlah anggota pada masing-masing suku tersebut. Dengan demikian terjadilah pemisahan-pemisahan atau pemecahan-pemecahan suku dari satu menjadi dua atau lebih. Sehingga hal ini memberi peluang dan kesempatan yang lebih luas di dalam masyarakat Sulit Air dalam perihal perkawinan.

Suatu wadah lagi yang tak kalah pentingnya bagi masyarakat Sulit Air adalah Sulit Air Sepakat (SAS). Organisasi ini, yang semula merupakan organisasi bagi para perantau, telah berdiri sejak tahun 1918, dan baru dikukuhkan sebagai organisasi bagi segenap warga perantauan Sulit Air pada tanggal 3 Juli 1970 (DPP SAS, 1990:6), telah meluas bagi segenap warga yang ada pertaliannya dengan Sulit Air. Organisasi ini telah mampu mengikat segenap warga Sulit Air, baik yang berada di perantauan di seluruh pelosok Nusantara ini dan bahkan di beberapa kota di luar negeri, maupun masyarakat yang berada di Sulit Air sendiri. SAS telah menjadi tumpuan dan harapan bagi segenap warga dalam rangka untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kampung halaman sendiri, baik dari segi mental spiritual dan fisik maupun dari segi material.

Adalah suatu hal yang lumrah, apabila organisasi tersebut memegang peran yang sangat besar di dalam kehidupan masyarakat, karena keterlibatan masyarakat sebagai anggota sangat besar dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan Nagari Sulit Air melalui rapat-rapat dan pertemuan pimpinan SAS baik di tingkat pusat dan ataupun pada tingkat cabang. Adakalanya pimpinan SAS turun langsung ke lapangan dalam hal pengurusan pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan, seperti pembangunan Masjid Raya Sulit Air. Begitu juga halnya dengan pengerasan jalan dari Gantiang ke Rawang lebih kurang 450 meter (wawancara simultan, 17 Oktober 1995) dilaksanakan setelah salah seorang pimpinan SAS datang berkunjung ke sana, masyarakat mengemukakan keluhannya bahwa jalan tersebut sudah tidak layak lagi dan perlu diperbaiki. Dana diturunkan untuk membeli bahan-bahan seperti pasir dan semen bagi dam dan got serta pengerasan bagian-bagian yang perlu, sedang masyarakat hanya tinggal bergotong royong untuk mendam, meratakan dan menimbun bagian-bagian tertentu saja.

Di samping itu banyak pula muncul para penggagas secara individu ataupun keluarga, seperti Yayasan Rora, Yayasan Harfiah, Yayasan Yaraja, Yayasan El Hakim, dan Yayasan Gunung Merah. Yayasan-yayasan tersebut memberi dana untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dan ada yang tidak.

Selanjutnya ada pula pribadi-pribadi yang sukses secara ekonomi ikut "berlomba" mensponsori proyek-proyek seperti jembatan, mesjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Dt. Polong Kayo (Silungkang, 21 Oktober 1995) dan Ramawi, Kepala Desa Basuang Limaupuruik, (Duo Koto, 17 Oktober 1995) mengemukakan bahwa orang Sulit Air tidak akan dihargai di kampung, kalau belum ada bukti sumbangannya untuk pembangunan di Sulit Air sendiri.

Berikutnya adalah suatu pemandangan yang biasa di Sulit Air, bila didapatkan rumah-rumah yang megah dan mewah dengan arsitektur Minangkabau, tetapi tanpa penghuni (tuan rumah), karena mereka berada di perantauan. Kalaupun ada yang menghuninya, biasanya didatangkan orang untuk menjaganya. Dalam suatu perbincangan dengan beberapa orang anggota masyarakat di kedai kopi (Duo Koto, 10 Nopember 1995) dan Ramawi, Kepala Desa Basuang Limaupuruik, (wawancara, Duo Koto, 17 Oktober 1995) terungkap bahwa orang Sulit Air belum dianggap berhasil kalau belum membangun rumah gedung (mewah) di kampung. Tampaknya hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri pula yang ditunjukkan kepada masyarakat tentang keberhasilan yang telah dicapainya, sehingga mendorong yang lain untuk berusaha dan bekerja keras agar menjadi berhasil dalam usahanya.

2. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Fisik

Seperti halnya daerah lain, kenegarian Sulit Air tidak kalah kemajuannya dalam melakukan pembangunan. Berbagai sarana fisik yang telah dan sedang dibangun dapat dilihat di sini, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan, gedung pertemuan dan sekolah, rumah sakit, tempat-tempat ibadah, sarana rekreasi dan lainnya. Pembangunan tersebut pada umumnya terlaksana merupakan bantuan, baik dari pihak pemerintah maupun atas usaha masyarakat Sulit Air sendiri, sponsor atas nama DPP SAS atau cabang atau bersifat individual. Sementara partisipasi masyarakat Sulit Air sendiri secara garis besar terhadap pembangunan tersebut dapat terlihat dalam dua tipe kehidupan, yaitu sentral dan pinggiran.

Hal ini dapat terlihat pada beberapa proyek pembangunan. Sebagai contoh proyek pembangunan yang merupakan bantuan pemerintah, biasanya adalah proyek-proyek rutin dan atau melalui usulan dari masyarakat Sulit Air sendiri. Proyek dimaksud adalah pengaspalan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan kota kecamatan dan kota kabupaten. Dalam hal ini peranan organisasi SAS sangat besar sekali sebagai pengayom dan mediator warga Sulit Air yang berada di kampung. Lebih kurang 13 kilometer jalan raya dengan jumlah biaya lebih kurang Rp. 289 juta dari anggaran pembangunan

negara telah mengalir ke Sulit Air selama periode kepemimpinan Rainal Rais. Suatu jumlah bantuan negara yang agaknya belum pernah terjadi selama ini di daerah ini. Hal itu terlaksana atas usaha segenap warga parantauan Sulit Air yang tergabung di dalam SAS sebagai penyambung lidah warga yang menetap Sulit Air sendiri. (Rainal Rais, Pidato Pertanggungjawaban DPP SAS Periode 1986-1988 pada Musyawarah Keluarga SAS IX di Sulit Air 14 Mei 1988 dalam Goresan-Goresan Pemikiran dan Perbuatan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air", TT, 28-29). Tentu saja proyek-proyek tersebut yang sebelumnya lebih banyak menjadi tanggung jawab masyarakat Sulit Air, untuk selanjutnya akan lebih banyak menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian tugas masyarakat dalam hal ini menjadi berkurang dan dapat dialihkan untuk keperluan lain.

Hal tersebut dapat terlihat pada proyek-proyek yang dikelola oleh pemerintah, seperti jalan, yang telah menjadi pengawasannya. Kalau jalan tersebut rusak atau pinggir dan gotnya sudah ditutupi rerumputan dan belukar, maka hal itu menjadi tanggung jawab rutin pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum. Meskipun demikian masyarakat akan turun bergotongroyong kalau ada kepentingan yang mendesak. Seperti penulis lihat sendiri pada tanggal 28 Oktober 1995, masyarakat Silungkang sebanyak lebih kurang 20 orang bersama kepala desanya melakukan

gotong royong membersihkan jalan tersebut sepanjang lebih kurang 350 meter, yang biasanya dikerjakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Namun kegiatan tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Manunggal Sakato dan bulan bakti LKMD di Kecamatan X Koto Diatas, kenagarian Sulit Air termasuk di dalamnya. Dengan kata lain kegiatan tersebut adalah kegiatan yang telah diranacang oleh pemerintah secara rutin.

Pada desa-desa lain di Sulit Air saat bersamaan juga digelar kegiatan gotong royong dalam rangka kegiatan Manunggal Sakato dan bulan bakti LKMD tersebut. Di desa Basuang Limaupuruik dalam kegiatan serupa warga turun bergotongroyong membersihkan dan memperbaiki jalan tanah yang merupakan jalan vital bagi perekonomian mereka. Masyarakat turun sekitar 50 orang pada dua lokasi, suatu jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan desa lainnya. Menurut kepala desanya kita tidak boleh lunak menghadapi masyarakat, jika mereka tidak datang gotong royong kalau perlu dijemput, sementara daftar hadir diedarkan untuk mengecek kehadiran anggota (wawancara Ramawi Syam, Basuang Limaupuruik, 7 Nopember 1995). Meskipun demikian masyarakat merasakan bahwa hal itu (bergotongroyong) merupakan suatu keharusan untuk memperbaiki jalan itu, karena ini menyangkut kelancaran hubungan desanya dengan jalan raya. Memang ada juga beberapa di antara warga yang dijemput, tapi karena rumahnya

sangat jauh sekali dengan lokasi gotong royong, sehingga hal itu kurang dirasakan sebagai suatu tuntutan dan tanggung jawab. Sedangkan di desa Linawan meski pakai daftar hadir, bila ada warga yang melapor tidak bisa hadir, kepala desa mengizinkan karena ia menyadari bahwa di desanya banyak buruh tani, yang hidupnya sehari-hari banyak tergantung dari upah (wawancara, Burhanuddin Is, Linawan, 24 Oktober 1995).

Di desa Duo Koto pada tanggal 21 Oktober 1995 penulis mendapatkan masyarakat bersama kepala desa sekitar 13 orang sedang bergotong-royong membeton sebuah gang yang juga merupakan kegiatan serupa dengan di atas. Biaya kegiatan ini berasal dari dana bangdes. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari, kecuali hari minggu karena masyarakat umumnya pada hari itu pergi berburu babi. Karena dilaksanakan setiap hari, maka jumlah anggota masyarakat yang terlibat diatur secara konstan, hingga waktunya untuk kegiatan-kegiatan lainnya tidak habis begitu saja. Meskipun kehadiran warga dicek, namun untuk satu dan dua orang yang tidak hadir tidak jadi masalah, kata kepala desa, karena biasanya mereka ganti pada hari lain (wawancara, Asnawi, Duo Koto, 21 Oktober 1995). Walau demikian dari pembicaraan dengan seorang warga yang baru beberapa bulan pulang dari rantau (Bengkulu) dan membuka kedai minuman, nampaknya ada kekesalannya, karena dia pernah dijemput sebab tidak

hadir gotong royong satu kali (Duo Koto, 21 Oktober 1995).

Ada beberapa proyek pembangunan yang disponsori oleh warga Sulit Air, umumnya melalui yayasan-yayasan yang dibentuk oleh para keluarga dan ada yang bersifat individu. Kalau diperhatikan masing-masingnya, ada semacam kompetisi dan adu gengsi untuk menunjukkan bahwa mereka telah berhasil di rantau dan mampu berbuat untuk kampung halamannya. Masyarakat Sulit Air suka "cari nama" (menonjolkan diri pada yang lain), kalau si A bangun gedung ini atau rumah dengan gaya arsitektur Minang, maka si B, si C atau yang lainnya akan bangun pula tandingannya (wawancara, Ny. Rafida, Duo Koto, 27 Oktober 1995). Yayasan Rora menyediakan dana untuk pembangunan mesjid raya Sulit Air, sementara masyarakat menyumbangkan tenaganya untuk mengumpulkan batu dan pasir di sungai. Untuk gedung Taman Kanak-kanak (TK) ada yang sepenuhnya ditanggung biaya pembangunannya dan ada yang sebagian. Pembangunan rumah sakit, yayasan ini juga ikut di dalamnya bersama dengan yang lain-lainnya, sedang masyarakat menyediakan tanah dan tenaga bergotongroyong. Demikian juga halnya Yayasan El Hakim dengan donator utamanya Ibu Lisma Ibrahim mendirikan sebuah kampus Pesantren Politeknik Ummatan Washathon (PPUW) di Piek Ontang Sulit Air yang di dalamnya terdapat program pendidikan Diploma III untuk jurusan: Komputer Bisnis Program-

ming, Komputer Manajemen Perbankan dan Komputer Manajemen Akuntansi, di samping diploma I berbagai jurusan.

Selanjutnya yayasan Yaraja membangun Proyek Air Minum (PAM) di samping ikut membiayai pembangunan rumah sakit bersama yayasan Rora. Sementara pembangunan obyek rekreasi Jenjang Seribu dibiayai bersama oleh SAS dan cabang-cabangnya, iyuran masing-masing desa yang ada di Nagari Silit Air serta ditambah sumbangan dari perusahaan di luar Silit Air, seperti PT Semen Padang. Sementara masyarakat pada masing-masing desa datang bergotongroyong secara bergantian, kendati jarak lokasi dengan tempat tinggalnya cukup jauh, ada yang sampai 10 kilometer.

Di samping itu ada pula pembangunan dibiayai oleh seseorang secara individual melalui DPP SAS. Sebuah jembatan, biasa disebut oleh masyarakat "Titi Nan Bagonjong" dengan biaya lebih kurang Rp.45 juta, dibiayai pembangunannya sepenuhnya oleh Muslim Marah SH (biasa dikenal Mus Karya), seorang pengacara di Jakarta. Pembangunan jembatan tersebut mulai perencanaan, arsiteknya, teknisi beserta tukang-tukangnya di datangkan dari Jawa, dengan artikata tidak satupun orang Silit Air yang dikutsertakan. Dengan segala senanghati masyarakat menerimanya dan hanya tahu "beres" (tinggal menikmati) (wawancara, Yan. Dt. Bongso Rajo, Duo Koto, 27 Oktober 1995).

Di desa Rawang pada tanggal 17 Oktober 1995, penulis menemukan masyarakat sedang bergotongroyong membongkar atap mesjid. Dari pembicaraan dengan mereka bahwa mesjid yang ada akan ditambah satu tingkat lagi hingga menjadi dua tingkat. Dua tokoh masyarakat, Lanjumin (68 tahun) bersama Sudirman (42 tahun) mengatakan bahwa pembangunan mesjid tersebut disponsori oleh para perantau Rawang yang berada di Muaro Duo, Sumatera Selatan. Lebih kurang 75 persen biaya pembangunan mesjid ini berasal dari dana bantuan mereka. Pada saat bersamaan terungkap pula bahwa DPP SAS memberi bantuan dana pula untuk penambahan pembangunan 2 (dua) lokal belajar untuk Sekolah Dasar Rawang yang kekurangan lokal belajar bagi murid-muridnya. Penambahan lokal ini berhasil didapatkan melalui permintaan tokoh-tokoh masyarakat kepada DPP SAS. Di samping itu DPP SAS juga mengeluarkan dana bantuan untuk perbaikan dan pengerasan jalan dari Simpang Gantiang ke Rawang ini yang merupakan jalan tanah yang menghubungkan desa ini ke daerah sentral Sulit Air dan ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten, sedang untuk pelaksanaan pekerjaan, masyarakat turun bergotong royong (Rawang, 17 Oktober 1995). Jalan ini merupakan satu-satunya jalan menuju kota Solok.

DPP SAS dalam memberi bantuan untuk pembangunan fisik ini sangat selektif, bila benar-benar diperlukan ia akan turun dan pada umumnya untuk melengkapi yang

kurang serta punya nilai produktif. Untuk proyek pembangunan gedung SMA, SAS bertindak sebagai sponsor dan mencari sponsor. Kepada setiap cabangnya SAS memberikan tanggung jawab untuk mengumpulkan dana sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam waktu setahun. Kemudian secara pribadi Drs. H. Kamardy Arief memberi sumbangan berupa uang sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Sementara Yayasan Rosma Rais (Rora) memberi sumbangan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh juta rupiah). (Rainal Rais, Pidato Pertanggungjawaban DPP SAS Periode 1988-1990 pada Konperensi SAS XI di Sulit Air 21-24 April 1990 dalam Goresan-Goresan Pemikiran dan Perbuatan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air Sepakat", TT: 191).

Sementara itu gedung Pendidikan Sekolah Agama (PSA) yang terletak di Gando yang di dalamnya bernaung Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dibangun oleh ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Wanita Pendidikan Sekolah Agama di Sulit Air sendiri dibawah pimpinan Hj. Dahniar Zein.

Dalam pembangunan fisik ini, soal dana merupakan ketergantungan utama bagi masyarakat di desa, sehingga batuan dari luar sangat dominan, sementara partisipasi masyarakat hanya lebih bersifat kerja fisik.

3. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan

Rainal Rais, Ketua Umum DPP SAS, sudah seringkali mengemukakan keinginannya akan menjadikan Sulit Air sebagai pusat pendidikan, minimal untuk kabupaten Solok bagian utara. Dalam pidato pertanggungjawabannya sebagai Ketua DPP periode 1986-1988 pada Musyawarah Keluarga SAS IX di Sulit Air mengemukakan:

"Saya sering kali mencanangkan, agar dengan bantuan dan doa kita semua, marilah kita berusaha untuk menjadikan Sulit Air sebagai Pusat Pendidikan, baik pusat pendidikan umum maupun pendidikan agama, sekurang-kurangnya untuk Kabupaten Solok wilayah utara. Usaha-usaha itu telah mulai dirintis dengan dibangun dan diresmikannya gedung PSA Gando yang baru yang kini juga telah memiliki sekolah Aliyah pada tanggal 26 Pebruari 1987, tahun yang lalu. Kini kita tengah berusaha bagi perwujudan sebuah gedung SMA di Piek Ontang, yang pertanahannya kembali menjadi persoalan dan mudah-mudahan KAN dapat segera menyelesaikannya.

Dengan ada 2 sekolah Aliyah di Sulit Air ini, yang satu milik Muhammadiyah, yang satu lagi milik PSA, pada saatnya nanti akan kita dirikan pula perguruan tinggi agama Islam sebagai penampung kelanjutannya.

Mengenai Sulit Air sebagai kota pendidikan baiklah kita bahas lebih jauh lagi dalam acara seminar yang khusus diadakan untuk itu. (Rainal Rais Pidato Laporan Pertanggungjawaban DPP SAS Periode 1986-1988 pada Musyawarah Keluarga SAS IX di Sulit Air tanggal 14 Mei 1988 dalam Goresan-Goresan Pemikiran dan Perbuatan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air Sepakat", TT, 36).

Cukup beralasan apabila Rainal Rais mengemukakan gagasannya untuk menjadikan Sulit Air sebagai pusat pendidikan. Hal ini merupakan suatu alternatif yang dianggap lebih menguntungkan untuk pengembangan sumber daya manusia Sulit Air khususnya, kabupaten Solok

umumnya, bahkan lebih lagi dari itu, ketimbang sumber daya alamnya yang minus. Seperti dikemukakan Rainal

Rais berikut ini:

"Karena dengan usaha-usaha pertanian dan pertambangan kita tampaknya belum berhasil, maka kami melihat alternatif lain yang dapat kita kembangkan untuk menjadikan Sulit Air ini berbicara pada forum Sumatera Barat. Salah satu alternatif yang saya lihat adalah menjadikan Sulit Air ini sebagai pusat pendidikan karena pusat pendidikan tidak menjadikan kesuburan tanah sebagai salah satu persyaratannya". (Rainal Rais, Makalah pada Seminar Mukersas X tanggal 14 Mei 1988 di Sulit Air dalam Goresan-Goresan Pemikiran dan Perbuatan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air Sepakat", TT: 43).

Sebagai langkah untuk merealisasikan gagasan Ketua DPP SAS tersebut, Nagari Sulit Air sekarang telah memiliki tingkat pendidikan mulai dari tingkat pra sekolah (Taman Kanak-kanak) sampai ke tingkat Perguruan Tinggi. Pada umumnya sekolah-sekolah itu berdiri atas inisiatif masyarakat Sulit Air melalui organisasi SAS mereka. SAS bersama cabang-cabangnya dan para donaturnya mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan pendidikan tersebut.

Di Sulit Air sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) buah Sekolah Taman Kanak-kanak yang tersebar pada 6 (enam) desa (dua buah berada di desa Duo Koto). Masih ada 3 (tiga) desa lagi belum punya TK, untuk itu pemuka masyarakat bersama kepala desanya telah meminta bantuan dana kepada DPP SAS. Namun hal itu telah dipikirkan pengadaannya oleh DPP SAS, terutama Yayasan

Rora yang sangat banyak perhatiannya terhadap ini telah menyediakan dana untuk membantu. Bahkan untuk Desa Rawang, tahun ajaran 1996/97 mendatang berdiri TK (wawancara, Kaur Pembangunan, Rawang, 17 Oktober 1995). Sekolah Dasar berjumlah 16 (enam belas) buah tersebar pada setiap desa. Untuk beberapa desa ada yang lebih dari satu buah. Desa Duo Koto terdapat 5 (lima) buah; Desa Gando, Linawan, dan Basuang Limaupuruik (Bali) masing-masing terdapat 2 (dua) buah. Namun di Linawan dan Bali masing-masing satu buah punya masalah. Satu permasalahannya yang sama adalah kekurangan guru. Di Linawan dari kelas I sampai kelas VI hanya ada 3 (tiga) orang guru tetap tanpa punya kepala sekolah yang definitif. Sementara menurut kepala desa untuk menyediakan lokasi SD tersebut, masyarakat bergotongroyong meruntuhkan bukit setinggi 50 meter lebih karena ketiadaan lokasi untuk itu. Permasalahan ini sudah disampaikan kepala desa kepada Kepala Kandep P dan K kecamatan dan Kepala Dinas Tingkat II, tapi saat ini belum ada tanggapan. (wawancara, Burhanuddin Is, Linawan, 24 Oktober 1995).

Permasalahan bagi SD Basuang Limaupuruik selain punya guru hanya 3 (tiga) orang untuk kelas I sampai kelas VI dengan jumlah murid lebih kurang 58 (lima puluh delapan), letaknya di dusun Limaupuruik yang terpencil lebih kurang 8 1/2 kilometer dari kantor

kepala desa atau sekitar 10 kilometer dari jalan utama dan belum bisa dicapai dengan kendaraan roda empat. Kepala desa melihat persoalan ini bahwa sekolah tersebut "dimatikan" oleh guru. Sejak tahun 1994 bermula dari kepala sekolah yang tidak "beres". Dia tidak masuk ke sekolah sampai 2 1/2 bulan, kemudian murid kelas V dan VI dipindahkan ke SD No. 15 di dusun Basuang. Sejak tahun 1995 muridnya habis dipindahkan semua ke SD yang sama. Jadi menurut kepala desa lagi persoalan baru yang muncul adalah dengan dipindahkannya murid-murid tersebut berarti mereka ada yang berjalan kaki ke sekolah antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kilometer setiap hari, bahkan ada yang lebih dari itu. Sehingga orang tua murid kecewa, karena banyak di antara anak-anak mereka yang berhenti (keluar) bersekolah.

Menurut kepala desa bahwa sekolah tersebut banyak dibantu oleh Ketua DPP SAS berupa alat-alat tulis di antaranya mesin ketik, alat-alat olah raga, serta meubel seperti kursi, lemari dan tape recorder, namun barang-barang inventaris itu tidak ada lagi dijumpai. Setelah diselidiki oleh kepala desa, rupanya barang-barang yang diberikan melalui kepala sekolah itu tidak sampai ke sekolah. Sedangkan mengenai persoalan murid dipindahkan, dihadapan orang tua murid kepala sekolah mengemukakan alasan bahwa semua guru-gurunya akan

disekolahkan untuk mengikuti Program Penyetaraan D II. Setelah dicok ternyata program tersebut dilaksanakan hanya setiap hari minggu. Persoalan-persoalan tersebut telah disampaikan oleh kepala desa kepada Kepala Kandep P dan K kecamatan dan Kepala Dinas Ranting, dinyatakan bahwa buat sementara SD tersebut ditutup, karena persoalannya sekarang dalam taraf penyelesaian.

Untuk pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Sulit Air terdapat 3 (tiga) buah sekolah, yang terdiri dari sebuah sekolah umum yaitu SMP Negeri dan dua buah sekolah agama yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) PSA dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah. Dua sekolah agama tersebut lebih banyak mendapat bantuan perantau Sulit Air melalui SAS. Sementara SMP merupakan sekolah negeri yang telah menjadi tanggungan pemerintah tidak luput dari perhatian perantau, seperti beasiswa bagi yang berprestasi dan peralatan sekolah.

Pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Sulit Air terdapat pula 3 (tiga) buah sekolah, yang terdiri dari dua buah sekolah agama, yaitu Madrasah Aliyah (MA) PSA dan Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah, dan sebuah sekolah umum, yaitu SMA Negeri. Pada tahun ajaran 1990/1991 untuk pertama kali SMA Negeri Sulit Air ini menerima murid. Sementara waktu karena belum punya gedung dan ruang untuk belajar, siswanya ditumpangkan pada ruangan gedung sekolah PSA di Gando. Sekarang

telah telah menempati gedung dan ruang, serta sarana yang cukup memadai di Piek Ontang.

Pada lokasi yang berdekatan dengan SMA di atas terdapat pula sebuah kampus Perguruan Tinggi di atas tanah seluas 5.000 m² di bawah Yayasan El Hakim yang diberi nama Pesantren Politeknik Ummatan Washathon (PPUW) El Hakim. Perguruan Tinggi ini membuka program pendidikan Diploma III untuk jurusan: Komputer Manajemen Perbankan, Komputer Bisnis Programming, Komputer Manajemen Akuntansi, di samping membuka diploma I. Kampus Perguruan Tinggi ini dilengkapi laboratorium bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, unit komputer, sebuah mesjid, dan asrama bagi para santrinya. Dengan demikian gagasan menjadikan Sulut Air sebagai pusat pendidikan semakin menjadi kenyataan.

Di samping itu untuk merangsang dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sulut Air, SAS bersama para perantaunya selalu memberi dukungan baik moril maupun material. Pada umumnya yayasan-yayasan yang didirikan oleh warga Sulut Air mempunyai dana rutin dan insidental untuk membantu kegiatan pendidikan, seperti membantu sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Setiap tahun siswa yang mencapai prestasi tertinggi (juara kelas) diberi beasiswa. Begitu juga setiap tahun diadakan pemilihan

para teladan bagi guru-guru dan siswa-siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke tingkat Sekolah Menengah Atas. Mereka yang terpilih menjadi teladan diberi kesempatan rekreasi secara gratis oleh para dermawan ke tempat rekreasi yang ada di pulau Jawa (Irdison, SKB, 11 Nopember 1995).

Demikian juga mahasiswa Sulit Air yang melanjutkan pendidikannya di kota-kota lain yang mempunyai indeks prestasi yang tinggi ($IP > 2,50$) diberi beasiswa. Sedang bagi yang lulus ujian masuk ke perguruan tinggi tapi ekonominya lemah, mereka diberi biaya untuk melanjutkan pendidikannya (wawancara, Irdison, Siaru Kunyik Balai, 11 Nopember 1995).

4. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan

Ekonomi

Secara umum Sulit Air bukanlah daerah yang subur, karena itu pertanian yang ada di sana sangat terbatas. Kondisi ini pulalah yang menjadi salah satu penyebab masyarakatnya pergi merantau (wawancara Yan Dt. Bongso Rajo, Duo Koto, 27 Oktober 1995). Tingkat kesuburan tanah di desa-desa yang berada di kenagarian itu tidaklah sama, sehingga terdapat pula perbedaan karakteristik antara desa yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya desa-desa yang ada di kenagarian Sulit Air dapat diklasifikasikan atas tiga

kelompok. Pertama, daerah pertanian yang subur, seperti: Rawang, Linawan, dan Siaru Kunyik Balai (SKB). Kedua, daerah pertanian yang kurang subur, seperti: Basuang Limaupuruik (Bali), Tigo Korong, dan Talago Laweh. Ketiga, daerah non-pertanian, seperti: Duo Koto, Gando, dan Silungkang.

1). Pertanian

Areal pertanian paling luas di Sulit Air terdapat di desa Rawang (wawancara Amarullah Sirin, Rawang, 24 Oktober 1995). Hasil pertanian utama masyarakat adalah padi. Di samping itu juga diusahakan jenis tanaman keras, seperti casiavera (kulit manis), kemiri dan kelapa. Linawan dan Siaru Kunyik Balai juga merupakan daerah pertanian yang cukup potensial, dengan jenis tanaman hampir sama dengan yang diusahakan para petani Rawang. Akan tetapi di Siaru Kunyik Balai juga diusahakan jenis tanaman lainnya, yaitu plawija, kopi dan kemiri (damar) (wawancara Syawal, Siaru Kunyik Balai, 14 Nopember 1995).

Mayoritas masyarakat di Desa Basuang Limaupuruik (Bali), Tigo Korong, dan Talago Laweh juga hidup dari hasil pertanian. Namun, hasil pertanian di tiga desa tersebut tidaklah begitu tinggi, bahkan Bali dan Tigo Korong merupakan daerah yang minus hasil pertaniannya

(Asnawi, Duo Koto, 22 Oktober 1995). Di daerah Tigo Korong sebagian masyarakatnya terpaksa mencari pekerjaan tambahan lain, seperti menjadi buruh dan mencari kayu ke hutan, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari (Syahril St. Sati Batuah, Tigo Korong, 10 November 1995). Faktor penyebab dari semua ini, disamping tanah pertanian yang kurang subur di desa-desa tersebut, juga disebabkan sebagian masyarakatnya kekurangan modal sehingga tidak bisa melakukan aktivitas pertanian secara optimal.

Berbeda halnya dengan Desa Duo Koto, Silungkang, dan Gado, di tiga desa tersebut pertanian hampir dikatakan tidak ada. Mayoritas masyarakat di tiga desa itu - yang dilihat dari segi geografis Sulut Air secara keseluruhan adalah daerah sentral (pusat) - hidup dari "wesel", artinya mereka sangat tergantung dari kiriman sanak keluarga yang berada di rantau. Barangkali citra Sulut Air selama ini yang dikenal sebagai "nagari Wesel" lebih inheren di daerah ini, ketimbang desa-desa lainnya di Sulut Air. Meskipun demikian, sebagian masyarakat yang berdomisili di desa ini mengusahakan perdagangan, dan dengan kelebihan uang yang mereka peroleh dari rantau, maka sebagian lagi dari mereka "memperduakan" ternak dengan masyarakat yang berada di desa-desa lainnya (wawancara Dt. Tan Aceh, Duo Koto, 22 Oktober, 1995).

Pertanian yang dilakukan masyarakat Sulut Air sebagian besar bersifat swadaya. Artinya mereka mengusahakan pertanian sendiri dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada mereka tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Bantuan-bantuan dari SAS, terutama dalam bentuk materil (uang atau peralatan), kepada petani di Sulut Air, hampir dikatakan tidak ada. Dalam hal ini suatu sisi lemah dari organisasi terbesar masyarakat Sulut Air itu, dimana kurangnya perhatian mereka terhadap peningkatan pertanian. Sebagai contoh adalah di Desa Talago Laweh. Minusnya hasil pertanian di daerah itu sebagian besar disebabkan kurang baiknya saluran air (irigasi) ke sawah-sawah penduduk. Alternatif pemecahannya adalah digunakannya saluran air yang memakai paralon, dan ini sudah berkali-kali dibicarakan masyarakat desa itu dengan pimpinan SAS guna mendapatkan bantuan. Akhirnya masyarakat desa tersebut sekarang ini memilih untuk melakukan lobi dengan pemerintah (Hasan Basri Salim Dt. Kayo, Talago Laweh, 11 November 1995). Fenomena seperti itu juga ditemukan di desa-desa lain, sehingga dari hasil pengamatan dan wawancara dengan petani terlihat adanya semacam sikap pesimis dan kurang percaya para petani terhadap organisasi itu, terutama dalam membantu meningkatkan kehidupan mereka.

Secara teoritis sebetulnya banyak gagasan-gagasan yang dilahirkan SAS untuk meningkatkan kehidupan para petani di Kenagarian Sulit Air, akan tetapi dalam prakteknya tidak jalan. Sekitar tahun 1992 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SAS membentuk Badan Koordinator Gerakan Tani Tanaman Buah-Buahan dan Tanaman Sulit Air, yang diketuai Muchlis Listo. Badan ini bertugas menyelidiki kondisi desa-desa Sulit Air yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman (Rainal Rais, TT: 268). Namun dalam realisasinya yang ditanam hanyalah kemiri di beberapa desa, diantaranya SKB dan Tigo Korong, dan itupun adalah bantuan dari pemerintah (Bupati Solok) bukan SAS (Rainal Rais, TT: 268). Kemudian pada tahun yang sama telah dibentuk pula Forum Komunikasi sembilan desa Sulit Air di bawah pimpinan Syahril Sutan. Tujuannya antara lain adalah untuk menggali potensi ekonomi desa-desa Sulit Air dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi inipun tidak terlaksana dengan baik (Rainal Rais, TT: 268).

Meskipun demikian, bantuan dari pemerintah pernah diterima para petani di beberapa desa di Sulit Air. Misalnya, pada Bulan Juni 1992 Menteri Muda Pertanian, Syarifuddin Baharsyah menyerahkan bantuan bibit kedelai kepada petani di Sarikieh (Tigo Korong), sebagai

bagian dari usaha tani terpadu berwawasan lingkungan. Dari 20 ha tanah yang dijadikan lahan uji coba, pada tahun 1992 telah menghasilkan kedelai dengan harga jual sekitar Rp. 20 juta (Rainal Rais, TT:267). Di samping itu, pemerintah Dati II Solok juga menyerahkan bantuan bibit rambutan, nangka, durian dan malinjo kepada para petani di Desa Tigo Korong. Bantuan ini cukup berhasil karena dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal (Syahril St, Sati, Tigo Korong, 10 November 1995). Sementara itu, di Desa SKB pemerintah mengadakan pembibitan kemiri untuk penghijaun seluas 100 ha. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah di Desa Linawan, dimana kemiri dibagi-bagikan kepada masyarakat. Akan Tetapi di Linawan kurang berhasil dengan baik, karena terbentur dengan sistim budaya masyarakat. Masyarakat Linawan sudah terbiasa bekerja dengan sistim upah, sehingga mereka tidak mengurus kemiri yang ditanam di ladang-ladang secara maksimal. Akibatnya produksi kemiri yang diperoleh di daerah itu tidak maksimal dan kurang baik kualitasnya (Burhanuddin Is, Linawan 24 Oktober 1995).

Masalah lain yang cukup vital dihadapi mayoritas masyarakat petani di Kenagarian Sulit Air adalah kekurangan modal. Meskipun ada BPR Surya Katialo, LPN dan KUD Sulit Air, tetapi itu tidak dapat membantu pemecahan persoalan mereka. Sebagian besar petani

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Sulit Air tidak mau menggunakan jasa ketiga lembaga tersebut. Persyaratan, prosedur dan sanksi yang diterapkan lembaga perekonomian tersebut dirasa terlalu memberatkan bagi para petani, sehingga mereka "enggan" dan "jera" untuk berurusan (tentang hal ini akan dibahas dalam bagian tersendiri bab ini). Untuk menghindari resiko, maka para petani yang kekurangan modal lebih banyak meminjam sesama mereka, meminjam pada sanak famili atau meminta bantuan kepada keluarga yang ada di rantau.

2). Peternakan.

Di samping bertani, sebagian masyarakat Sulit Air juga mengusahakan peternakan. Akan tetapi di Sulit Air tidak ada peternakan dalam jumlah yang besar (Yustinar, Silungkang, 28 Oktober 1995). Jenis peternakan yang diusahakan masyarakat adalah: ayam, itik, kambing, dan sapi.

Sama halnya dengan pertanian, tidak ada subsidi yang cukup berarti dari SAS untuk mengembangkan peternakan di kenegarian Sulit Air. DPP SAS pernah memberi bantuan ternak sapi dalam jumlah terbatas kepada masyarakat Sulit Air, tepatnya di desa Tigo Korong. Dalam tahun 1992 DPP SAS memberikan bantuan 5 (lima) ekor sapi kepada desa tersebut melalui Bupati Solok. Akan tetapi bantuan tersebut dapat dikatakan

tidak berhasil, karena "kualitas" sapi yang diberikan itu kurang memenuhi persyaratan. Menurut kepala desa Tigo Korong, ketika sapi itu datang tidak satupun masyarakat yang bersedia untuk memeliharanya, sehingga terpaksa diambil langsung pemeliharaannya oleh kepala desa tersebut. Untuk merawatnya kepala desa Tigo Korong harus mengeluarkan biaya Rp. 40.000,- per-ekor setiap bulannya (wawancara, Syahril St. Sati Batuah, Tigo Korong, 10 Nopember 1995).

Sejalan dengan program IDT (Inpres Desa Tertinggal), beberapa desa di Sulit Air menerima bantuan ternak dari pemerintah. Misalnya desa Gando menerima bantuan ayam dan sapi dari pemerintah. Penerima IDT di desa Gando lebih kurang 25 kepala keluarga (wawancara, Dt. Suku Malakomo, Gando, 25 Oktober 1995).

3). Kerajinan dan Keterampilan

Di Sulit Air sekarang sedang berkembang kerajinan jahit menjahit, tepatnya "bordir talakuang" (mukena). Hasil kerajinan ini tidak hanya untuk konsumsi lokal (Sulit Air), tetapi juga beredar di daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat. Bahkan bordir talakuang Sulit Air sekarang ini adalah paling terkenal dan banyak diminati dan dikirim ke luar daerah, seperti Jakarta dan Pekanbaru (wawancara, Rafida, Duo Koto, 27

Oktober 1995).

Usaha bordir talakuang itu di Sulit Air antara lain dikelola oleh: H. Kasnani, H. Karlis, H. Martias, H. Suarni Ismail, Lisarni, Sarimanis, dan H. Suntimar Ismail. Bahan-bahan disediakan oleh pengelola bordir, sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh warga Sulit Air yang pandai menjahit, dengan sistim upah. Malahan untuk menyiapkan tenaga yang siap pakai, oleh H. Suntimar, secara pribadi, telah didirikan suatu keterampilan bordir/sulaman. Untuk tujuan ini, ia mendatangkan tenaga pengajar khusus dari Padang, sedangkan wanita-wanita yang belajar di sana tidak dikenakan bayaran. Dengan demikian, kerajinan bordir talakuang yang berkembang sejak 1992, telah menjadi satu income yang cukup berarti bagi masyarakat di nagari itu (wawancara, Rafida, Duo Koto, 27 Oktober 1995).

Akan tetapi pada sisi lain, kerajinan-kerajinan tangan tradisional masyarakat Sulit Air sudah mulai terdesak, bahkan hilang. Kerajinan tangan tersebut adalah: topi pandan, lapiak (tikar) pandan, tali ijuk, sapu ijuk, dan periuk tanah. Penyebabnya adalah keluarnya produk-produk baru yang lebih baik sebagai akibat kemajuan teknologi, di samping minat masyarakat terhadap kerajinan itu makin berkurang (wawancara, Syawal, SKB, 14 Nopember 1995).

4). Peranan BPR, BRI, LPN, dan KUD Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Surya Katialo Sulit Air didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990, yang peresmiannya dilakukan langsung Menteri Keuangan JB. Sumarlin di Padang, bersamaan dengan 6 BPR lainnya di Sumatera Barat (Rainal Rais, TT, 228). Tujuan pendirian lembaga ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sulit Air yang berada di kampung halaman. Hal ini dapat dilihat dari kata-kata ketua DPP SAS, Rainal Rais, ketika badan itu baru berdiri, sebagai berikut:

"... Demikian pula perjuangan kita bagi berdirinya BPR "Surya Katialo" tidak terhenti sampai bahwa ia telah berdiri, tetapi masing-masing kita harus berupaya dan berikhtiar, bagaimana BPR "Surya Katialo" itu dapat memainkan peranan yang besar dalam memutar roda perekonomian masyarakat kita di Sulit Air secara cepat dan meyakinkan. Dalam hubungan ini saya mengimbau kepada warga SAS belilah saham BPR "Surya Katialo" yang bernilai Rp. 10.000,- per saham, menabunglah di BPR "Surya Katialo". Apa yang anda peroleh sebagai nasabah pada bank-bank lain juga akan anda peroleh dari BPR Surya Katialo. Sebagai bonusnya dengan menabung di BPR "Surya Katialo" berarti anda telah ikut berperan serta dalam kegiatan memajukan perekonomian warga kita di kampung halaman yang nun jauh di sana ...".
(Rainal Rais, TT, 229)

Akan tetapi dalam perekonomiannya, tujuan BPR terlihat bergeser sehingga banyak menimbulkan kritik dari tokoh-tokoh dan masyarakat Sulit Air di Kampung. Seperti yang dikatakan Abbas Bakar Dt. Bagindo Rajo:

"BPR sudah bercork "borjuis" dan mengarah ke sistem "kapitalis". Mereka mencari untung besar dan mempersulit prosedur peminjaman untuk masyarakat kampung yang rata-rata ekonomi lemah. Keikutsertaan rakyat dalam memanfaatkan BPR hampir tidak ada, rata-rata peminjam sekarang adalah orang rantau. BPR bukan lagi milik masyarakat Sulit Air, tetapi adalah milik kelompok-kelompok tertentu". (wawancara Abbas Bakar Dt. Bagindo Rajo, Gando, 21 Oktober 1995).

Keritikan dari tokoh dan masyarakat Sulit Air memang tepat dan ada benarnya, jika diperhatikan dari eksistensi lembaga tersebut sekarang di tengah masyarakat Sulit Air. Mayoritas masyarakat Sulit Air yang petani tidak dapat memanfaatkan lembaga tersebut secara maksimal. Bahkan ada kesan bahwa mereka cenderung menghindar untuk berurusan dengan BPR. Hal ini disebabkan persyaratan dan prosedur peminjaman ke BPR amat sulit. Untuk meminjam para petani diharuskan memberikan jaminan yang layak. Bahkan petugas BPR langsung turun ke lapangan untuk memeriksa jaminan tersebut. Padahal sebagian besar petani Sulit Air adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki jaminan yang benefit dari segi Bank. Dengan demikian ada kesan seakan-akan mereka dipersulit untuk meminjam. Di samping itu lagi, mereka hanya diberikan pinjaman terbatas, paling tinggi Rp. 500.000,- sehingga kadangkala tidak mencukupi bagi mereka. Setelah itu lagi bunga ditetapkan relatif tinggi dibandingkan BRI. Bunga di BPR ditetapkan 2% sedangkan di BRI hanya

1 1/2% (wawancara Yustinar, Silungkang, 28 Oktober 1995).

Perkembangan seperti di atas menyebabkan BPR Silit Air sekarang ini lebih banyak dimanfaatkan para perantau yang berada di luar Silit Air. Dalam kepemilikan saham juga demikian, hanya sekitar 5% masyarakat Silit Air di kampung yang memiliki saham di BPR, sedangkan sisanya adalah saham para perantau. Diperkirakan saham BPR sekarang sudah mencapai 680 juta (wawancara Rafida, Duo Koto, 27 Oktober 1995).

Para petani dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya yang berada di Silit Air sebagian kecil mencari pinjaman modal ke BRI dan LPN Silit Air. Misalnya di desa Siaru Kunyik Balai (SKB), para anggota kelompok tani (Batu Tudung dan Baringin Jaya) lebih banyak meminjam ke BRI ketimbang BPR. Alasannya prosedur peminjaman ke Bank pemerintah itu lebih gampang serta bunga lebih rendah (wawancara, Syawal SM, SKB, 14 Nopember 1995). Demikian juga di LPN (Lumbang Pitih Nagari), sebagian masyarakat Silit Air, seperti di Silungkang dan Basuang Limaupuruik (Bali), juga menggunakan jasa lembaga tersebut. Di samping prosedur peminjaman di sana tidak berbelit-belit, badan itu lebih "murni" milik masyarakat, karena sebagian modalnya adalah kepunyaan masyarakat di kampung (wawancara Abbas Bakar Dt. Bagindo Rajo, 21

Oktober 1995).

Namun fenomena yang tampak sekarang adalah bahwa para petani dan masyarakat golongan ekonomi lemah lainnya sama sekali menghindarkan berurusan dengan lembaga-lembaga formal di atas. Seperti di desa Rawang, Linawan dan Gando, masyarakat "enggan" dan tidak mau meminjam ke BPR, BRI maupun LPN. Sebagaimana yang diungkapkan Sekretaris Desa Gando: "Para petani jarang meminjam ke BPR, BRI ataupun LPN, kalau kekurangan modal, mereka lebih suka rembuk dengan keluarga" (wawancara Dt. Suku Malakomo, 28 Oktober 1995).

Lain lagi halnya dengan KUD (Koperasi Unit Desa) Sulit Air. Lembaga ini tidak mendapat tempat lagi di mata masyarakat Sulit Air. Dengan kata lain, masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Masalahnya lembaga tersebut telah berkali-kali jatuh bangun dengan citra yang buruk. Penyebabnya dari semua itu, di samping kepengurusan dan keorganisasian yang tidak baik, juga banyaknya muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan uang, seperti korupsi (wawancara Yustinar, Silungkang, 28 Oktober 1995 dan Dt. Tan Aceh, Duo Koto, 28 Oktober 1995).

5). Pariwisata

Sulit Air pada prinsipnya punya potensi untuk dikembangkan menjadi obyek wisata. Di samping umumnya alamnya indah, masih ada beberapa lokasi yang dapat dijadikan obyek, seperti: Gunung Merah dan Gunung Putih, Batu Bagantuang, Talago Laweh, Air Terjun Gunung Papan, dan lain-lain. Potensi ini masih banyak yang belum digarap untuk mendatangkan keuntungan ekonomi, namun masyarakat sudah mulai menyadarinya, seperti perbaikan obyek wisata talago laweh dan pembangunan proyek obyek wisata Jenjang Seribu.

Menyadari potensi obyek wisata Jenjang Seribu ini Syawal, yang sekarang kepala desa Siaru Kunyit Balai, sudah sejak tahun 1986 mengemukakan gagasan tentang obyek ini. Kemudian setelah ia diangkat jadi kepala desa mengajukan lagi usul perbaikan obyek wisata ini dalam pertemuan-pertemuan dengan pemuka-pemuka dan anggota-anggota masyarakat. Usul tersebut diajukan kepada perantau Sulit Air yang akhirnya mengeluarkan dana untuk pembangunan yang dikoordinir oleh DPP SAS. Sementara seluruh desa yang ada di Sulit Air di samping beriyur mengumpulkan dana, juga secara bergilir bergotongroyong dalam pengerjaannya (Syawal, SKB, 14 Nopember 1995).

5. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Kesehatan

Di Sulit Air terdapat sebuah Puskesmas dan sebuah Puskesmas Pembantu, masing-masing terletak di Balik Parit, desa Silungkang, dan di desa Rawang. Puskesmas di Balik Parit merupakan Puskesmas pertama di Sumatera Barat. Berawal dari sebuah pembangunan rumah sakit yang disponsori pembangunannya oleh seorang dermawan Sulit Air, Jamaluddin Tambam dengan Yayasan Yaraja-nya dan dibantu oleh Hj. Rosma Rais pada tahun 1973, kemudian setelah selesai dan dilengkapi dengan peralatannya diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah (wawancara, Yustimar, Silungkang, 28 Oktober 1995). Sementara Puskesmas Pembantu yang terletak di desa Rawang dibangun pada tahun 1993 atas biaya pemerintah dan swadaya masyarakat yang tanahnya wakaf dari anak kemenakan Dt. Rajo Putieh (wawancara, Lanjumin, Rawang, 17 Oktober 1995).

Awalnya pembangunan Puskesmas di Balik Parit itu disebabkan oleh tidak adanya rumah sakit yang terdekat tempat warga berobat. Rumah sakit terdekat hanya terdapat di kota Solok yang jaraknya dari Sulit Air lebih dari 30 kilometer. Tergugah dengan kesulitan yang dialami masyarakat, sehingga timbul keinginan dari seorangan dermawan untuk membangun rumah sakit.

Hal ini mendapat dukungan dari perantau lainnya (wawancara, Yustimar, Silungkang, 28 Oktober 1995).

Sementara pada desa-desa lain hanya terdapat bidan desa. Suatu permasalahan mengenai bidan desa terjadi di desa Bali yang ditempatkan di dusun Limau-puruik. Masalahnya adalah mengenai tempat tinggal bidan itu. Semula dikatakan ada dana Rp. 2,2 juta per-tahun bagi bidan tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak dibebani untuk ini. Namun dalam kegiatan Posyan-du dipungut biaya, sehingga masyarakat kurang senang padanya, karena perbuatan yang tidak simpatik terse-but. Akhirnya masyarakat pindah berobat ke Puskesmas di Balik Parit yang jaraknya lebih kurang 8 kilometer dari kampungnya. Bahkan rumah masyarakat yang ditem-pati bidan, masyarakat keberatan menerimanya. Tampak-nya menurut kepala desa pengawasan dari dokter Puskes-mas yang membawahnya kurang (wawancara, Ramawi Syam, Bali, 7 Nopember 1995).

Sementara itu dalam hal MCK, sebagian besar penduduk telah memilikinya pada setiap rumah. Namun karena kebutuhan air masih banyak tergantung dari air hujan yang ditampung pada masing-masing rumah, apabila musim kemarau datang, maka penduduk menggunakan MCK umum. Bagi daerah Sulit Air sentral (Duo Koto, Gando dan Silungkang) yang dibelah dua oleh batang Katialo, mereka memanfaatkan aliran sungai itu untuk membangun

MCK umum. Tampaknya ini juga telah menjadi tradisi bagi masyarakat, meskipun mereka punya MCK sendiri, namun masih memanfaatkan sungai tersebut, karena punya nilai-nilai tersendiri di dalam pergaulan sebagaimana halnya tapian di dalam suatu nagari.

Untuk sumber air bersih Sulit Air masih mengalami kekurangan. Sebagian besar penduduk menampung air hujan karena umumnya air tanah cukup dalam. Untuk mengatasi masalah kekurangan air ini, Jamaluddin Tamban secara pribadi telah membangun proyek air minum (PAM) di Duo Koto. Proyek yang akhirnya diserahkannya pengelolaannya kepada pemerintah ini (PDAM) hanya mampu menjangkau sebagian kecil masyarakat Sulit Air (wawancara, Dt. Bangso Rajo, Gando, 21 Oktober 1995).

Pemukiman penduduk pada daerah sentral (Duo Koto, Silungkang dan Gando) tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan tata ruang yang ideal. Rumah penduduk tidak tertata rapi, sehingga bangunan umumnya tumpang tindih. Bila masuk ke pemukiman ini dari jalan raya umumnya melalui gang jalan setapak. Keadaan seperti ini merupakan pemukiman yang tidak sehat dan belum mengantisipasi bahaya lebih lanjut, seperti kebakaran. Hal ini muncul karena sulitnya lahan untuk pemukiman di samping harga tanah cukup mahal pada daerah ini.

6. Latar Belakang Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Sulit Air

Nagari Sulit Air yang terisolasi dan terpisah agak jauh dengan nagari-nagari dan daerah di sekitarnya dikelilingi oleh jajaran bukit barisan yang bergelombang, hingga menjadikan alamnya indah dan menawan. Namun perbukitan itu merupakan bukit-bukit batu dan kapur serta gundul yang tidak memberikan kesuburan pada tanahnya, sehingga tidak mampu memberikan kehidupan ekonomi yang baik dan layak bagi penduduknya pada sektor pertanian. Hal ini mendorong penduduk bekerja keras untuk membangun sektor-sektor lain di samping mencari kemungkinan untuk peningkatan sektor pertanian. Di samping itu merantau atau migrasi merupakan alternatif lain yang sangat diminati oleh masyarakat untuk peningkatan kehidupannya membantu keluarga yang ditinggalkannya di kampung.

Secara umum masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Sulit Air adalah pengembangan lahan dan peningkatan hasil pertanian yang menjadi sumber utama bagi ekonominya. Namun dengan sentuhan secara tradisional tidak banyak yang dapat meningkatkan produksi. Apalagi pertambahan penduduk semakin tidak dapat diimbangnya, karena juga menyangkut peningkatan hasil pertanian dengan luas lahan yang tersedia. Hal ini membutuhkan agen-agen pembaru, baik yang berasal dari luar maupun

dari dalam, untuk membawa masyarakat keluar dari persoalan yang dihadapinya.

Oleh karena sektor pertanian belum dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, maka muncullah pedagang 'babelok' (musiman) dari warga Silit Air (belum dapat dikategorikan perantau karena secara permanen masih menetap di kampung) yang membeli barang kebutuhan untuk daerah yang akan dituju kemudian dalam beberapa hari atau minggu, mereka kembali ke kampungnya. Daerah-daerah yang dituju terutama di sekitar Sumatera Barat, seperti Riau, Jambi dan Bengkulu. Dengan cara demikian mereka ini dapat meningkatkan ponghasilannya. Keberhasilannya membawa pengaruh dan memotivasi terhadap yang lain.

Ikatan tradisional punya andil yang cukup besar dalam menggalang rasa persatuan dan kekeluargaan di antara warga masyarakat. Hal ini dapat dilihat masih terpeliharanya kerukunan hidup di dalam beberapa buah "rumah gadang" yang di antaranya ada mempunyai 20 ruangan di dalamnya. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tradisional tertinggi masyarakat Silit Air sangat besar fungsinya dalam membina dan menyelesaikan masalah sosial budaya yang dihadapi warganya, di samping mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul. Bahkan masalah adat istiadat yang dihadapi perantau Silit Air (yang bukan berada di

kampung) juga minta diselesaikan oleh KAN. (Dt. Bagindo Rajo, Gando: 21 Oktober 1995).

Tradisi di atas semakin kuat lagi dengan menanamkan pada lelaki Sulit Air supaya mereka memilih jodoh orang sekampungnya. Untuk memberi keleluasaan bagi warganya memilih jodoh tersebut, dilakukan pemekaran suku dari 4 (empat) suku mulanya mejadi 15 (lima belas) suku. Sedang bagi wanita agak longgar sedikit, karena pada prinsipnya suku tidak kehilangan pada keturunannya dan pusaka tinggi, karena anak yang dilahirkan akan tetap menjadi anak orang Sulit Air. Sementara lelaki kawin dengan orang luar, maka anaknya bukan menjadi milik orang Sulit Air lagi.

Ada lagi tradisi di Sulit Air, dimanapun ia merantau, tapi mereka pulang untuk menghabiskan hari tuanya. Kendati kampung menjadi tempat istirahat bagi mereka, namun mereka menjadi tokoh masyarakat yang disegani. AB Dt. Bagindo Rajo dan Yasir Dt. Bangso Rajo adalah bekas perantau yang pulang kampung, masing-masing pernah menjadi Ketua KAN dan Lumbung Pitih Nagari. Gagasan-gagasannya sangat besar artinya dalam pembangunan negari. Bahkan Rainal Rais sendiri mengemukakan demikian, apabila dia sudah pensiun (tua) akan menghabiskan waktunya di kampung. Hal ini dimungkinkan, karena alam dan suhu udaranya menyenangkan. Sehingga banyak ditemukan penghuni rumah adalah orang

tua. Jadi wajar kalau para perantau mempunyai keinginan dan merasa berhasil bila mereka telah mampu membangun rumah di kampungnya.

Di samping hal-hal di atas, suatu hal yang tidak boleh diabaikan adalah faktor letak negari Sulit Air. Negari ini terisolasi dan terpisah agak jauh dengan negari-negari di sekitarnya, sehingga kurang banyak bersentuhan, walaupun ada tidak dominan, maka tradisi Sulit Air tetap terpelihara. Hal ini akan mengentalkan tradisinya, sehingga merasa lebih dari yang lain, yang mendatangkan kebanggaan pada warganya. Ini besar artinya untuk menciptakan kesatuan di antara warga dan mencapai sukses secara bersama.

Sebagaimana telah diketahui secara umum oleh masyarakat di daerah ini bahwa masyarakat Sulit Air terkenal sebagai perantau yang ulet dan sukses. Kesuksesan mereka di rantau tidak membuatnya lupa akan kampung halamannya. Malahan menanamkan rasa cinta kampung yang membawa pengaruh cukup besar terhadap daerahnya. Kecintaan terhadap kampung semakin besar, sehingga mereka mengorganisir diri sebagai warga perantau dalam satu wadah yang diberi nama Sulit Air Sepakat (SAS).

SAS merupakan organisasi perantau terbesar dan terorganisir dengan baik di nusantara ini yang mempunyai lebih kurang 82 cabang. Untuk mengevaluasi kema-

juan pelaksanaan program kerja dan memperkokoh keutuhan organisasi, secara rutin SAS mengadakan konferensi sekali dua tahun yang biasanya diselenggarakan di Sulit Air sendiri pada akhir Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun yang bersangkutan (DPP SAS, TT: 13). Seluruh pimpinan cabang yang ada dan juga biasanya diikuti oleh para perantau pulang ke kampung dan ini telah menjadi suatu tradisi yang lazim disebut dengan "pulang basamo". Pada saat konferensi inilah dipilih dan ditetapkan pengurus baru, serta dibicarakan masalah organisasi, pembangunan nagari dan masalah-masalah lain-lain dianggap penting.

SAS merupakan wujud dari persatuan dan kekompakan warga Sulit Air di perantauan. Pada sebuah kota atau tempat dapat didirikan cabang SAS bila pada kota atau tempat itu telah bermukim setidaknya 6 kepala keluarga, dan yang memiliki lebih dari 100 kepala keluarga, untuk kelancaran kegiatan organisasi jika perlu dapat mendirikan lebih dari satu cabang SAS atas persetujuan DPP SAS (DPP SAS, TT: 12). Ini menunjukkan bahwa bagi warga Sulit Air berorganisasi itu penting sekali untuk menunjukkan identitasnya. Sehingga setiap tahun dimungkinkan muncul cabang baru. Pada akhir tahun 1993 cabang SAS baru berjumlah 78 buah, hingga sampai awal tahun 1995 telah berjumlah 82 buah cabang. Pertumbuhan cabang ini menunjukkan penambahan jumlah

perantau Sulit Air dan juga menunjukkan betapa penting menjadi anggota organisasi ini bagi warga Sulit Air.

SAS merupakan organisasi perantau yang anggotanya berasal dari satu tanah leluhur yaitu kenagarian Sulit Air. Dengan arti kata bahwa organisasi ini bersifat kekeluargaan dan mempunyai ikatan tradisional dengan kampung halaman, namun punya anggaran dasar dan tujuan serta tata aturan yang jelas. Di dalam tujuannya, organisasi ini menyatakan: untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat Sulit Air; berusaha menanamkan dan memupuk rasa kesadaran berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi, bernegara, dan beragama di kalangan anggota; dan berusaha memperjuangkan perbaikan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat Sulit Air (DPP SAS, TT: 6). Dengan tujuan ini di samping memberi harapan dan perlindungan bagi anggotanya juga memberi tugas dan tanggung jawab.

Kecintaan masyarakat Sulit Air terhadap SAS merupakan wujud dari kecintaan mereka terhadap kampung halamannya. Di dalam organisasi ini mereka berhimpun untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapinya, baik dalam hal kehidupan diperantauan maupun kehidupan di Nagari Sulit Air sendiri.

Perhatian yang begitu besar terhadap kampung bagi perantau Sulit Air tidak mungkin muncul secara



spontan saja. Hal ini bisa tumbuh bila ada penyemaian bibit yang baik dan diikuti oleh pemeliharaan dan pembinaan yang baik pula, hingga akhirnya mengakar begitu kuat dan kokoh. Bagi masyarakat Sulit Air, itu telah ditanamkan oleh orang tuanya sejak lama. Mereka pegang teguh pepatah lama, "hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri awak, kampung halaman tetap dicintai". Hal ini belum pudar dari dalam kehidupan masyarakat Sulit Air.

Sementara itu untuk memelihara rasa cinta terhadap kampung halaman, berbagai momen, kesan dan kenangan dibuat. Di antaranya hal-hal khas hasil Sulit Air selalu dipertahankan. Para perantau pendahulu telah memberi kesan dan pengalaman yang baik sebagai contoh dan teladan bagi generasi berikut. Bagi para perantau baru, mereka ditampung dan dibina sampai mereka mampu berdiri sendiri. Hal ini berantai untuk yang berikutnya. Sehingga adakalanya dalam satu rantau terdapat mereka yang berasal dari satu desa saja yang menonjol, seperti Muaro Duo di Sumatera Selatan di dominasi oleh orang Rawang, dan seterusnya. Kebiasaan pulang kampung setiap lebaran dengan acara-acara seremoninya.

B. Pembahasan

Melihat kepada tipe geografis daerahnya, maka secara umum masyarakat Sulit Air terbagi ke dalam dua tipe, yaitu masyarakat yang dominan agraris dan yang dominan non-agraris. Kedua tipe tersebut tumbuh dan berkembang pada masing-masingnya, meskipun demikian satu sama lain mempengaruhi. Namun tradisi tidak begitu mudah mengalami perubahan, walau arus perubahan selalu mengintai dan menampakkan diri.

Ikatan tradisi tersebut pada masyarakat bermata dua. Pada satu sisi melembagakan tradisi tersebut, dan pada sisi lain mengembangkannya untuk kepentingan kemajuan masyarakat. Dengan melembaganya ikatan tradisi ini menjadikan hukum adat tetap terpelihara. Pecahnya nagari yang merupakan satu kesatuan hukum adat menjadi beberapa desa yang merupakan satu kesatuan administrasi pemerintahan tidak menjadi masalah yang mendasar. Peran kerapatan adat nagari (KAN) tetap seperti sediakala. Namun ikatan tradisi tersebut menyebabkan ketergantungan pada pemegang peran cukup besar.

Meskipun demikian dengan ikatan tradisi ini memudahkan untuk memobilisasi potensi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat lebih banyak jalan melalui mobilisasi ini. Di samping itu secara individual tampil para pelopor sebagai unjuk keberhasilannya. Dengan arti kata partisipasi

lebih banyak masih digerakkan dari atas (top-down). Namun untuk masyarakat yang tingkat kepeduliannya masih rendah masih dibutuhkan para pelopor sebagai pemancingnya. Tapi kalau dominasi pelopor terlalu besar menyebabkan timbulnya ketergantungan. Akhirnya inisiatif masyarakat menjadi rendah, sehingga partisipasinya tidak banyak mengalami perubahan.

Kebiasaan para perantau membuat masyarakat menjadi tergantung selama ini sudah mulai diadakan perubahan. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya diinjeksi dari rantau, tapi mulai dilakukan usaha yang produktif untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Namun hal itu tidak mudah diterima begitu saja. Sebagai contoh BPR yang didirikan oleh perantau tidak banyak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di kampung, karena menyangkut prosedur peminjaman yang harus dipatuhi, di samping peminjaman tidak dapat diberikan begitu saja tanpa ada jaminan yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga BRI. Sehingga pemegang saham dan kreditur banyak dimanfaatkan oleh perantau, karena mereka punya usaha dan ketepatan waktunya dalam pembayaran.

Partisipasi dalam bidang pembangunan fisik masih banyak tergantung dari pemegang keputusan. Hal ini bisa saja pada tingkat pemerintah, pimpinan masyarakat atau individu yang punya otoritas untuk itu. Dalam hal ini tentu yang lebih banyak diharapkan berasal dari

kebutuhan masyarakat sendiri.

Dalam bidang pembangunan pendidikan hampir sepenuhnya masyarakat menerima saja. Pengambil keputusan dan kebijaksanaan lebih banyak datang dari perantau dalam bentuk yayasan-yayasan yang didirikan ataupun melalui DPP SAS. Namun hal ini dapat dimengerti karena membutuhkan dana dan pemikiran serta wawasan yang cukup besar dan luas, serta pertimbangan-pertimbangan yang jauh ke depan. Peran pelopor sangat penting untuk memberi keyakinan kepada masyarakat dan sebagai mediator untuk urusan-urusan yang lebih tinggi.

Dalam bidang kesehatan, kepeloporan individu sangat besar terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana, seperti rumah sakit dan penyediaan air bersih, masyarakat berperan hanya sedikit dan lebih banyak tinggal memanfaatkan saja. Tapi dalam ruang lingkup lebih kecil, seperti MCK, peran masyarakat cukup besar.

Akhirnya dari semua itu, tampaknya partisipasi perantau dalam membangun Sulit Air sangat besar, baik sebagai penyandang dana dan pemikir serta pengambil keputusan atau sebagai partisan, maupun sebagai mediator dalam mendapatkan bantuan proyek dari pemerintah. Partisipasi tersebut muncul di samping atas keberhasilannya, tetapi juga atas ikatan tradisi yang melekat pada dirinya. Sedangkan masyarakat kampung dalam hal ini lebih banyak berperan dari mobilisasi pimpinannya.

BAB. V
KESIMPULAN

Hasil temuan penelitian ini telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka kesimpulannya dirumuskan adalah berikut ini.

1. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangun Fisik

Partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik ini lebih banyak berupa tenaga ketimbang pikiran dan dana. Dalam hal ini sedikitnya dapat dibagi dua tipe partisipasi masyarakat yaitu daerah sentral dan pingiran. Hal ini terutama dapat dilihat dalam penyediaan sarana dan prasarana dan pada waktu gotong royong dalam hal kehadiran, meski keduanya mengarah ke mobilisasi, namun daerah pinggiran biasa lebih besar. Di samping itu peran perantau dan pimpinan masyarakat masih cukup penting mendorong warga untuk lebih banyak berperan.

2. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan

Pendidikan

Masyarakat kampung dalam bidang ini lebih banyak berperan serta sebagai pemakai dan pendorong, sedang perantau lebih banyak sebagai pemberi fasilitas dan pendorong. Ada semacam motivasi dari perantau untuk

mengembangkan daerah ini menjadi sentra pendidikan, karena hal ini diperkirakan memberi prospek sosial budaya dan ekonomi bagi kampung halaman.

3. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Ekonomi

Dalam hal ini ada dua tipe yang berbeda antara daerah sentral dan pinggiran, tapi ada perkembangan baru di antaranya. Daerah sentral yang sebagian besar penduduknya merantau menjadikan masyarakat di kampung banyak tergantung daripadanya, sementara daerah yang kurang perantaunya agak lebih mandiri, namun sedikitnya agak terpengaruh juga. Lebih-labih setelah SAS banyak berperanserta dalam pembangunan. Setelah menyadari hal demikian barulah mulai dikurangi pola ketergantungan itu dengan membangun usaha-usaha produktif, kendati agak sedikit mandek dalam perkembangannya.

4. Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Kesehatan

Secara umum peran serta di bidang ini cukup baik, hanya saja masalah pemukiman yang agak menyulitkan, karena kekurangan lahan, terutama pada daerah sentral. Dalam hal penyediaan fasilitas yang besar seperti rumah sakit dan proyek air bersih masih banyak tergantung dari dermawan.

5. Latar Belakang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam hal ini ikatan tradisi masih tetap terpelihara dalam pergaulan hidup masyarakat dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, kemampuan pimpinan masyarakat membuat momen-momen dan kesan bagi warganya yang berada di kampung dan para perantau, adanya kegiatan rutin yang dibuat setiap tahun, serta adanya SAS untuk menghimpun warganya, sehingga banyak membantu dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembangunan Desa, Daerah Tingkat I Sumatera Barat. (1981). Buku Pedoman Pokok-Pokok Pembangunan Desa. Padang: Pengarang.
- DPP SAS. (1990). Buku Saku Sulit Air Sepakat (SAS). Jakarta: Pengarang.
- Hanafiah, T. (1978). Suatu Pendekatan Dalam Pembangunan Desa Dan Unit Daerah Pembangunan. Bogor: Fakultas Pertanian Bogor.
- Koentjaraningrat. (1981). Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Maskun, Sumitro. (1991). Pedoman Penyusunan Profil Desa. Jakarta: Dirjen Bangdes.
- (1994). Pembangunan Masyarakat Desa. Azas, Kebliaksanaan, dan Manfaat. Yogyakarta: M.W. Mandala.
- Mubyarto. (1984). Strategi Pembangunan Pedesaan. Yogyakarta: P3K.
- Rais, Rainal. (TT). Goresan-goresan Pemikiran dan Perbuatan Selama Sembilan Tahun Mendayung Perahu "Sulit Air Sepakat". Jakarta.
- Ritzer, G. (1985). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Penyadur, Ali Maulana). Jakarta: Gramedia.
- Riyadi, S. (1981). Pembangunan, Dasar-dasar dan Pengertianannya. Surabaya: Usaha Nasional.
- Saleh, Azis. (1989). Partisipasi Sosial Dalam Pembangunan. Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan regional Wilayah Barat dan Hasil-hasil Penelitian WUAE Project. Padang.
- (1995). Masyarakat Dan Budaya Lokal: Partisipasi Dalam Kehidupan Politik Nasional. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Soedjatmoko Anual Memorial, UNAND Padang. 27 April 1995.
- Soekanto, Soejono. (1982). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.

Suryadi, A. (1983). Pembangunan Masyarakat Desa.
Bandung: Penerbit Alumni.

Taufik, Erdi. (1989). faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Partisipasi Masyarakat Desa Pada Kegiatan
Posyandu Desa Kepala Koto Lima Puluh Kota.
Skripsi Sarjana Fakultas Sastra UNAND Padang.

Lampiran 1

PEDOMAN BAGI PENGUMPUL DATA

Dalam penelitian ini, keputusan mengenai yang akan menjadi pusat perhatian di lapangan diserahkan kepada pengumpul data sesuai dengan pengalamannya di lapangan. Namun demikian untuk mengarahkan perhatian pengumpul data selama di lapangan diberikan rambu-rambu umum sebagai pedoman.

Untuk itu sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka kegiatan observasi, wawancara, dan telaahan dokumen, pengumpulan data dapat mengarahkan perhatian dalam situasi sosial pada hal-hal berikut:

1. Setting sosial.
2. Obyek fisik desa.
3. Bentuk kegiatan.
4. Pelaksanaan kegiatan.
5. Waktu kegiatan.
6. Sasaran kegiatan.
7. Tingkat keterlibatan dalam kegiatan.
8. Partisipasi sosial:
 - a. perencanaan
 - b. pengambil keputusan
 - c. menikmati hasil